

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN.....	i
LEMBAR PERNYATAAN.....	ii
ABSTRAK.....	iii
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Penelitian.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Kegunaan Penelitian.....	12
E. Kerangka Pemikiran.....	13
F. Metode Penelitian.....	33
1. Spesifikasi Penelitian.....	33
2. Metode Pendekatan.....	34
3. Tahap Penelitian.....	35
4. Teknik Pengumpulan Data.....	38
5. Alat Pengumpulan Data.....	39
6. Analisis Data.....	39
7. Lokasi Penelitian.....	40
8. Jadwal Penelitian.....	42
G. Sistematika Penulisan.....	43
BAB II KAJIAN TEORITIS TENTANG PASAL 33 UNDANG-UNDANG DASAR 1945 TERKAIT PENCABUTAN SUBSIDI BAHAN BAKAR MINYAK YANG DILAKUKAN OLEH PEMERINTAH INDONESIA	
A. Dasar Hukum Perekonomian Indonesia.....	46
1. Landasan Sistem Ekonomi Indonesia.....	52
2. Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 Sebagai Dasar Tertinggi Perekonomian Indonesia.....	54
3. Kedudukan Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 Merupakan Ketentuan Imperatif.....	60
B. Fungsi Dan Peran Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 Dalam Pembentukan Hukum Ekonomi Indonesia.....	60
1. Makna Dan Asas-asas Yang Terkandung Dalam Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945.....	60
2. Fungsi dan Kekuatan Mengikat Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 Terhadap Pembentukan Hukum Ekonomi Indonesia.....	64
3. Peran Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 Dalam Pembentukan Hukum Ekonomi Dan Perbandingan Dengan Konstitusi Negara Lain.....	67
C. Regulasi Subsidi.....	70
1. Subsidi dalam <i>World Trade Organization</i>	73

	2. Pengaturan Subsidi Dalam <i>General Agreement On Tariffs And Trade</i>	77
	3. Program Subsidi Pemerintah Indonesia.....	84
	D. Pencabutan Subsidi Bahan Bakar Minyak Oleh Pemerintah Indonesia Ditinjau Dari Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945	89
BAB III	PENCABUTAN SUBSIDI BAHAN BAKAR MINYAK OLEH PEMERINTAH INDONESIA	
	A. Alasan-Alasan Pemerintah Indonesia Melakukan Pencabutan Subsidi Bahan Bakar Minyak	96
	1. Alasan Pemerintah Indonesia.....	97
	2. Penyebab Utama Tidak Tercukupinya Kebutuhan Minyak Dalam Negeri.....	101
	3. Solusi palsu Pemerintah Jokowi untuk menjawab kenaikan harga Bahan Bakar Minyak.....	118
	B. Mekansime Dan Syarat Melakukan Pencabutan Bahan Bakar Minyak Di Indonesia	120
	1. Kebijakan Pemerintah Harus Berlandaskan Hukum Sesuai Dengan Konsep Negara Indonesia Berdasar Atas Hukum (<i>Rechstaat</i>).....	120
	2. Mekanisme Pencabutan dan Perubahan Subsidi Di Indonesia.....	123
	C. Pengaruh Pencabutan Subsidi Bahan Bakar Minyak Terhadap Perekonomian Indonesia	126
	1. Pencabutan Subsidi Bahan Bakar Minyak sebagai Bentuk Liberalisasi Sektor Energi Di Indonesia.....	127
	2. Pencabutan subsidi bahan bakar minyak sebagai bentuk liberalisasi ekonomi Indonesia.....	130
	3. Pencabutan subsidi bahan bakar minyak sebagai kebijakan yang tidak Pro Rakyat.....	132
BAB IV	ANALISIS TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH TERHADAP MASYARAKAT INDONESIA ATAS PENCABUTAN SUBSIDI BAHAN BAKAR MINYAK DITINJAU DARI PASAL 33 UNDANG-UNDANG DASAR 1945	
	A. Landasan Hukum Pemerintah Dalam Melakukan Pencabutan Subsidi Bahan Bakar Minyak Dikaitkan Dengan Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945	134
	B. Bentuk Penyimpangan Terhadap Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dalam kaitannya dengan kebijakan Pencabutan Subsidi Bahan Bakar Minyak	150
	1. Penetapan Harga Bahan Bakar Minyak Sesuai Dengan Mekanisme Pasar Bukan Perintah Konstitusi.....	150
	2. Pencabutan Subsidi Bahan Bakar Minyak Menciptakan Disorder Sosial dan Neoliberalisme.....	152

3. Pengaruh <i>World Trade Organization</i> dan Negara Maju Dalam Penetapan Harga Bahan Bakar Minyak Di Indonesia	155
C. Peninjauan Kembali Kebijakan Pencabutan Subsidi Bahan Bakar Minyak Dikaitkan Dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.....	162
1. Posisi Indonesia sebagai Negara berkembang.....	162
2. Memperhatikan Kedaulatan Ekonomi Nasional.....	165
3. Posisi Keanggotaan Indonesia Sebagai Negara Berkembang Didalam <i>World Trade Organization</i>	167
 BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	171
B. Saran.....	177
 DAFTAR PUSTAKA.....	x
LAMPIRAN.....	xiv